

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan masyarakat yang berbasis agama, sekaligus menjadi induk lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Berdirinya pondok pesantren menjadi naungan para ulama Nusantara untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jika melihat eksistensi pertumbuhan pondok pesantren sejak dahulu, fungsi utamanya merupakan sebuah lembaga yang akan mempersiapkan para santri untuk mendalami dan menguasai ilmu agama Islam atau dikenal dengan istilah *tafaqquh fi al-din* (mendalami agama islam supaya menjadi orang berakal di dunia dan akherat). Harapannya dapat melahirkan kader-kader ulama serta ingin mencerdaskan masyarakat Indonesia agar mempunyai fondasi umat islam yang kuat di bidang akhlak.<sup>1</sup> Jika melihat data di lapangan 75% dari total persebaran pondok pesantren di dominasi oleh pulau jawa. Secara lebih lanjut, data Kemenag RI periode 2021 bahwa jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai 26.975 sedangkan Pulau Jawa berjumlah 21.236 pondok pesantren. Apabila diuraikan, persebaran pondok pesantren mayoritas berada di Pulau Jawa. Jawa Barat menempati posisi pertama dengan jumlah pondok pesantren sebanyak 4.579 kemudian diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 4.452 serta Jawa Tengah dengan total 3.787 unit.<sup>2</sup>

Istilah pesantren sendiri berasal dari kata pe-“santri”-an yang diadopsi dari kosakata Jawa yang berarti murid serta istilah pondok yang berasal dari kata “*funduq*” dalam kosakata Arab yang berarti penginapan atau tempat untuk singgah sementara. Penyelenggaraan pondok pesantren terdiri dari tempat tinggal untuk santri yang dibawah langsung oleh kyai sekaligus sebagai pengasuh. Kemudian dibantu oleh beberapa pihak disekitar lingkungan pesantren seperti ulama, masyarakat sekitar, pemerintah serta dikelilingi oleh masjid dan gedung sekolah

---

<sup>1</sup>Usman, I. M. (2013). Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam. *Jurnal Al Hikmah*, 14(1), 101-119.

<sup>2</sup> Dimas Bayu, “Indonesia Miliki 26.975 Pesantren, Ini Sebaran Wilayahnya,” *DataIndonesia.id*, 5 Mei 2022, <https://dataIndonesia.id/ragam/detail/indonesia-miliki-26975-pesantren-ini-sebaran-wilayahnya>. akses tanggal 20 Desember 2022

formal. Banyaknya kemunculan dari Pondok Pesantren ini dipandang sebagai lembaga pendidikan non formal, menggabungkan keilmuan dari kitab klasik yang tertulis beberapa abad silam oleh para ulama dengan pendidikan kontemporer yang terdapat pada sekolah umum.

Selain menjadi pusat pendidikan, pondok pesantren ini juga menjadi basis perjuangan oleh kaum nasionalis-pribumi untuk memperjuangkan kemerdekaan kala itu<sup>3</sup>. Karena pada masa kolonial banyak dari kalangan kyai dan santri yang berinisiatif untuk ikut andil dalam membela negara saat melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semakin diperkuat oleh peristiwa pemberontakan kepada pihak sekutu yang terjadi di Surabaya diboncengi oleh NICA akibat tewasnya Jendral Brigjen Mallaby yang terkena ledakan bom pada mobil yang ditumpangnya. Faktanya pemasangan bom pada mobil bukan dilakukan oleh tentara melainkan dari kalangan santri yang berasal dari Tebuireng, Jombang.<sup>4</sup> Dengan adanya peristiwa sejarah itu, peranan kyai dan santri terhadap kemerdekaan Indonesia sangat besar. Mereka rela berkorban demi keutuhan NKRI sekaligus membentuk kelompok cikal bakal adanya TNI,<sup>5</sup> dalam pandangan agama islam ini merupakan sebuah bentuk jihad yang mana tanggal 22 Oktober diperingati sebagai hari Santri Nasional.

Keterbukaan budaya pondok pesantren yang interaktif terhadap lingkungan sekitar membuatnya berperan penting dalam memajukan pendidikan bangsa. Oleh karena itu dunia pesantren tidak hanya sebatas mendalami ilmu agama, pengabdian seorang santri terhadap ulama atau kyai, kaidah moralitas dalam bermasyarakat dan sebagainya. Eksistensi pesantren tidak sebatas berkuat sebagai lembaga pendidikan saja tetapi juga memiliki basis penting dalam dunia perpolitikan ini. Dimana relasi antara dunia politik dengan dunia pesantren memiliki integritas yang kuat semenjak zaman kemerdekaan Indonesia berlangsung. Hingga saat ini banyak

---

<sup>3</sup>Syafe'i, I. (2017). Pondok pesantren: Lembaga pendidikan pembentukan karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61-82.

<sup>4</sup> Djibril Muhammad, Narasi Heroik Santri yang ditelan Zaman, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171020192235-20-249865/narasi-heroik-santri-yang-ditelan-zaman>, akses 17 November 2021.

<sup>5</sup>Afadha, S. I. (2021). *Kemampuan Survival Pondok Pesantren Dalam Dinamika Sosial Politik Di Indonesia: Studi Kasus Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)*.

sekali praktek politik yang membaaur ke ranah pesantren melalui relasi, kekuasaan, politik yang dilakukan oleh kyai sebagai pemegang status sosial tertinggi di lingkungan pondok pesantren atau disebut sebagai “*elite* lokal”. Karena keterlibatan kiai atau ulama dalam dunia politik dikarenakan adanya relasi antara agama dengan negara dimana memiliki hubungan simbolik, timbal balik antara keduanya. Sehingga kyai pesantren menganggap bahwa mereka memerlukan integritas dengan politisi sebagai upaya dukungan kegiatan keagamaan di wilayahnya maupun sebaliknya.<sup>6</sup>

Percaturan agama dan politik timbul ketika para pemimpin dan cendekiawan muslim beranggapan bahwa dimensi dari seluruh kegiatan umat manusia tidak terlepas dari *syari'at* agama islam. Sehingga ketiadaan kekuasaan politik dalam suatu negara akan menimbulkan sistem hukum islam tidak berfungsi secara maksimal. Politik dalam suatu negara ada kalanya membutuhkan agama sebagai kekuatan legitimasi. Karena agama berperan strategis dalam membentuk strukturisasi sebuah negara yang berasal dari kerangka nilai dan normanya. Sebagai bentuk representasi dari pemikiran tersebut, lahirlah partai islam sebagai wadah aspirasi umat islam saat itu untuk menumbuhkan kesadaran politik. Sarekat Islam (SI) sebagai partai pertama dalam sejarah kontemporer Indonesia. Kemudian terdapat MIAI dan Masyumi yang memiliki tujuan untuk menyatukan kekuatan partai islam dan organisasi islam untuk menghadapi situasi negara yang semakin kritis.<sup>7</sup>

Dalam dunia perpolitikan Indonesia yang diwarnai isu tersebut membuat segala bentuk kegiatan politik terutama pemilu selalu dipayungi oleh konsep agama yang telah terealisasikan pada saat pemilu periode kedua Presiden Joko Widodo. Hal yang cukup menarik terjadi ketika Jokowi mengumumkan calon wakil presiden, karena cawapres tersebut mempunyai posisi penting sebagai ulama besar saat itu. Para politisi ini akan mendatangi lembaga pesantren dengan beberapa tim sukses pada masa kampanye yang mempunyai maksud untuk memperoleh banyak

---

<sup>6</sup> Fadhilah, A. (2011). Struktur dan Pola kepemimpinan kyai dalam pesantren di Jawa. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8(1), 101-120.

<sup>7</sup> Ahmad Syafii Ma'arif, *Percaturan islam dan politik teori belah bambu masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965*., Pertama (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

suara karena mereka mengetahui partisipasi kyai dan santri akan sangat berpengaruh pada masa pemilu yang akan datang. Sehingga pemilihan presiden tahun 2019 dengan capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini akhirnya didukung oleh Partai PDI-Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, Partai Perindo, PKPI, PSI, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan yang mempunyai pengaruh besar dalam dunia perpolitikan Indonesia. Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang merakyat bersama wakilnya Ma'ruf Amin yang merupakan ketua MUI sekaligus PBNU. Kedatangan mereka ke pondok pesantren memiliki tujuan untuk mendapatkan simpatisasi dari kalangan kiai dan santri karena dalam lingkungan tersebut rasa solidaritas masyarakatnya sangat tinggi serta ingin meminta restu agar diberikan kelancaran saat pemilu berlangsung. Keberhasilan pemilu dari paslon Jokowi-Ma'ruf dibuktikan melalui Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dikutip dari portal berita CNN Indonesia dimana hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pemilih paslon Jokowi-Ma'ruf merupakan dominasi umat muslim terutama ormas NU dan Muhammadiyah dimana diantara ormas tersebut rata rata berasal dari kalangan santri atau pondok pesantren. Lebih rinci bahwa dari total jumlah pemilih Islam yang berasal dari kalangan NU menyumbang responden sebanyak 50,1% sedangkan pemilih islam yang terafiliasi Muhammadiyah sebesar 4,8% dari total keseluruhan pemilih islam. Bagi pemilih yang tidak dipayungi oleh ormas agama berdasarkan LSI mereka telah menyumbang sebanyak 39,8% dari total keseluruhan pemilih beragama muslim. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi dari pemilih yang berasal dari kalangan pesantren (NU) merupakan bukti yang nyata relasi politik dengan agama telah membuahkan hasil.<sup>8</sup>

Kecenderungan capres untuk mendatangi pondok pesantren telah memperlihatkan bahwa nilai politik elite lokal menurut para politisi memiliki legitimasi kepentingan politik yang cukup tinggi sehingga tidak mengherankan jika capres ini memperoleh suara terbanyak karena suara yang diberikan oleh masyarakat pondok pesantren cukup besar.

---

<sup>8</sup> "Survei LSI: Jokowi-Ma'ruf Dominasi Segmen Pemilih Islam," CNN Indonesia, 12 April 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190412193934-32-385859/survei-lsi-jokowi-maruf-dominasi-segmen-pemilih-islam>.

Relasi antara politik dengan agama juga terjadi dalam lingkup Ponpes Segoro Agung yang berlokasi di Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur sebagai objek penelitian ini juga memiliki integrasi dengan politisi di berbagai wilayah. Berdasarkan hasil pengamatan sejak tahun 2015 melihat banyak tokoh politik yang berkunjung di Pondok Pesantren Segoro Agung dari perangkat desa setempat hingga Gubernur Jawa Timur pernah mengunjungi tempat tersebut dengan tujuan ingin bekerja sama. Contohnya tahun 2019 Gubernur Jawa Timur yang didampingi oleh Wakil Bupati Mojokerto mendatangi Pondok Pesantren Segoro Agung untuk menyukseskan program santunan anak Yatim.



**Gambar 1. 1 Santunan Anak Yatim Ponpes Segoro Agung oleh Gubernur Jawa Timur**

Sebanyak 3196 paket sembako diberikan langsung oleh Gubernur Khofifah kepada anak yatim piatu dan kaum dhuafa. Bantuan ini bertujuan untuk menyampaikan rasa syukur karena telah mendapatkan hasil panen padi yang melimpah. Selain itu, Pondok Pesantren Segoro Agung baru-baru ini telah menyukseskan program panen raya yang dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI Sarmuji, Wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Bupati Mojokerto Pungkasiadi dimana mereka merupakan anggota politisi dari berbagai tingkatan pemerintah.



Gambar 1. 2 Panen Raya<sup>9</sup>

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan agraris wilayah Majapahit karena selama ini Kabupaten Mojokerto selalu memberikan hasil panen surplus. Program ini dilaksanakan dengan acara panen raya yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Melihat pola hubungan yang terjadi antara pesantren dengan politik. Relasi yang dilakukan oleh keduanya dapat melahirkan dua perspektif baik itu relasi yang bersifat positif atau negatif. Hal demikian dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pesantren seringkali mendapat bantuan finansial dari *elite politik*. Boleh jadi maksud pemberian bantuan mereka murni untuk ikut andil melancarkan kegiatan suatu pesantren atau bahkan mempunyai maksud tersendiri yaitu agar elite politik tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat di pesantren tersebut. Mereka beranggapan bahwa jika budaya pondok pesantren adalah tunduk dan patuh pada kyai atau istilahnya *Tawadhu'* maka, seorang pengasuh pondok pesantren yang telah memiliki integrasi baik dengan elite politik tersebut akan memberikan pengaruh besar terhadap seluruh santri dimana mereka juga akan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh kyai mereka. Tarik ulur pendapat yang terjadi menganggap bahwa kerjasama dengan dunia politik akan membawa manfaat. Karena sudah sewajarnya karena siapapun mendapatkan hak untuk mengaspirasi dunia politik termasuk juga pihak pesantren karena posisinya

---

<sup>9</sup> Kuntoro Rido A, "Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional, Ponpes Segoro Agung Gandeng Disperta Kabupaten Mojokerto," *beritajatim.com*, 5 Agustus 2020, <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/wujudkan-ketahanan-pangan-nasional-ponpes-segoro-agung-gandeng-disperta-kabupaten-mojokerto/>.

juga merupakan sebagai rakyat dari negara demokrasi ini. Akan tetapi sebagian juga bisa menganggap kerjasama seperti ini akan menimbulkan dampak negatif atau justru mendatangkan bahaya kepada pesantren.<sup>10</sup> Selain itu, banyaknya politisasi yang terjadi di kalangan pesantren membuat peran utama pesantren sebagai tempat untuk mengayomi masyarakat yang ingin memperdalam ilmu agama menjadi kombinasi politik dan agama yang menjadi pengaruh besar bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Oleh karena permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa selama ini masyarakat awam hanya mengetahui bahwa sebuah pondok pesantren hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran untuk memberikan pendalaman ilmu agama kepada santri, realitanya lingkungan pesantren telah beriringan dengan urusan politik. Penelitian ini berusaha menganalisis secara mendalam pola hubungan yang terbentuk antara “*elite lokal*” dengan “*elite politik*” pada Ponpes Segoro Agung Mojokerto Jawa Timur. Melalui paradigma interpretivisme yang dijelaskan secara kualitatif (deskriptif) pada sumber tertulis dan observasi langsung kepada pihak pesantren di Ponpes Segoro Agung Mojokerto Jawa Timur. Selain itu dalam penelitian ini akan melalui analisis pendekatan fenomenologi yang akan mengamati perilaku politik dengan lingkungan pesantren untuk mendapatkan kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana sejarah terjadinya relasi antara tokoh politik dengan Pondok Pesantren Segoro Agung?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk – bentuk yang dihasilkan dari relasi tokoh politik dengan Pondok Pesantren Segoro Agung?
- 1.2.3 Bagaimana motif relasi politik antara tokoh politik dengan Pondok Pesantren Segoro Agung?

---

<sup>10</sup> Ernas, S., & Siregar, F. M. (2010). Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik: Studi Kasus Pesantren di Yogyakarta. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2), 370-94.

<sup>11</sup>Jati, W. R. (2012). Ulama dan Pesantren dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 13(1), 95-111

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1. Untuk mengetahui sejarah terjadinya relasi antara tokoh politik dengan Pondok Pesantren Segoro Agung.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bentuk – bentuk yang dihasilkan dari relasi tokoh politik dengan Pondok Pesantren Segoro Agung?
- 1.3.3. Untuk mengetahui motif relasi politik antara tokoh politik dengan Pondok Pesantren Segoro Agung?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Peneliti berharap Agar kedua belah pihak baik tokoh politik dengan Pondok Pesantren Segoro Agung dapat menentukan sikapnya dalam sebuah relasi yang terbentuk diantaranya.
2. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam bidang pengembangan Ilmu Politik di lembaga sosial masyarakat.
3. Pada ranah akademik, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritik untuk memperkaya diskusi mengenai relasi politik dengan agama yang menjamur di Indonesia.
4. Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan politik dan agama.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Agar memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengetahui pola relasi yang terjadi antara tokoh politik dengan Pondok Pesantren.
2. Selain itu penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai relasi antara tokoh politik dengan Pondok Pesantren.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Sejauh ini telah ada sejumlah hasil penelitian berkaitan dengan Relasi Tokoh Politik dengan di Pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto Kajian pustaka yang dilakukan untuk melihat penelitian yang telah dilakukan sehingga penelitian ini berangkat dan mengisi kekosongan yang masih belum dilakukan oleh penelitian yang lain. Adapun penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:



*Pertama*, penelitian dari Afadha<sup>12</sup> Kemampuan Survival Pondok Pesantren Dalam Dinamika Sosial Politik Di Indonesia: Studi Kasus Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukannya merupakan sebuah disertasi berkaitan dengan bagaimana ketahanan pondok pesantren ditengah arus globalisasi dan perubahan politik yang terjadi di Indonesia. *Kedua*, penelitian yang dilakukan Ahmad Ramdani<sup>13</sup> sebuah skripsi yang berjudul Relasi Partai Politik dengan Pondok Pesantren (Studi Kasus PPP dengan Pondok Pesantren Darut Tafsir Kabupaten Bogor). Penelitian ini melihat bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh partai politik PPP dengan pondok pesantren Darut Tafsir Kabupaten Bogor. Kegiatan yang dilakukan berupa acara hari besar Islam dan kegiatan keagamaan lain dimana ada peran kegiatan partai politik PPP. *Ketiga*, Iqbal Sianturi yang melakukan penelitian berjudul relasi kiai di Pondok Pesantren Al-Falah IV dan Politik Lokal Di Ogan Komering Ulu Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa relasi yang telah dibangun antara Kiai di Pondok Pesantren Al-Falah IV dan Politik Lokal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dinilai efektif hal ini dibuktikan dengan telah dihasilkannya berbagai macam bentuk dan jenis kegiatan antara lain; kebijakan, aktivitas keagamaan, bantuan sosial yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.<sup>14</sup> *Keempat*, sebuah skripsi yang ditulis oleh Mukhlisi yang berjudul Pesantren dan Politik Pendidikan: relasi elite pesantren dengan pemangku kebijakan pendidikan di Sumenep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga tipologi relasi elite kebijakan pendidikan di Sumenep, yakni: Posisi kunci, seperti pihak eksekutif dan legislatif dan Dinas Pendidikan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Afadha, S. I. (2021). *Kemampuan Survival Pondok Pesantren Dalam Dinamika Sosial Politik Di Indonesia: Studi Kasus Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA*

<sup>13</sup>Ahmad Ramdani, Relasi Partai Politik dengan Pondok Pesantren (Studi Kasus PPP dengan Pondok Pesantren Darutafsir Kabupaten Bogor), Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

<sup>14</sup>Iqbal Sianturi, Relasi Kiai di Pondok Pesantren Al-Falah IV dan Politik Lokal Di Ogan Komering Ulu Selatan, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019.

<sup>15</sup>Mukhlisi, berjudul Pesantren dan Politik Pendidikan: relasi elite pesantren dengan pemangku kebijakan pendidikan di Sumenep, skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan pada objek yang akan diteliti yakni politik dan pesantren. Titik perbedaan yang tersaji antara penelitian terdahulu terletak pada relasi yang terjadi antara Pondok Pesantren Segoro Agung dengan tokoh politik yang terjadi pada tahun 2018-2021. Diawali dengan perbandingan penelitian pertama terdapat perbedaan yaitu jika penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada ketahanan sebuah pondok pesantren pada era globalisasi, serta menganalisa perubahan politik yang terjadi pada era globalisasi. Sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada relasi yang menciptakan kepentingan antara pondok pesantren dengan tokoh politik. Perbandingan penelitian kedua terletak pada metode analisis yang digunakan, peneliti melihat bahwa analisis yang terdapat pada penelitian kedua masih bersifat general dalam artian membahas relasi dengan analisis relasi antara tokoh politik dengan pondok pesantren tanpa menggunakan teori maupun pendekatan yang ada sedangkan penelitian ini membahas relasi antara tokoh politik dengan pondok pesantren dengan menggunakan beberapa teori serta pendekatan yang merujuk pada penelitian ini. Selanjutnya membandingkan dengan penelitian ketiga memiliki perbedaan yang terletak pada subjek penelitiannya yakni relasi pondok pesantren dengan elite lokal sedangkan penelitian ini mencakup lebih luas relasi dengan seluruh jajaran tokoh politik. Terakhir, membandingkan dengan penelitian yang keempat memiliki perbedaan yang terletak pada pola relasi antara pesantren dan politik yang berpengaruh pada kebijakan pendidikan islam daerah tersebut. Sedangkan penelitian ini cenderung melihat analisis *interest* yang terjadi antara pondok pesantren dengan tokoh politik.

## **1.6 Kerangka Teori**

### ***1.6.1 Vested Interest***

*Vested* awalnya mempunyai makna berpakaian yang kemudian mengalami pergeseran makna kepemilikan dan terakhir bermetamorfosa menjadi kepentingan pribadi dari penambahan kata "*interest*". Jadi definisi dari "*vested interest*" merupakan kepentingan yang muncul dalam diri seseorang atau kelompok dalam sebuah forum dengan mengesampingkan hak kebersamaan untuk menghasilkan keuntungan pribadi sehingga dalam

*vested interest* mengandung 3 unsur adanya motif kepentingan bersifat pribadi atau kelompok diantaranya, lunturnya hak bersama, perilaku objektif, motivasi kuat yang ada pada seseorang atau kelompok yang sangat kuat untuk mencapai keuntungan pribadi atau golongan, aktor yang terlibat dalam kepentingan tersebut. Dari paparan tersebut definisi dari “*vested interest*” dapat diasumsikan sebagai tindakan yang terlahir untuk menciptakan “keuntungan” serta “manfaat” yang hanya dirasakan oleh aktor yang memegang kepentingan tersebut. Sebagai contoh dalam suatu pemilu pasti segelintir orang atau kelompok mempunyai tujuan terselubung guna menyelesaikan kegiatan pemilu serta mendapatkan suara mayoritas dimana contoh seperti ini memiliki kepentingan yang memiliki pengaruh politik berdampak negatif terhadap masyarakat.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, *vested interest* terjadi karena sikap atau perilaku seseorang atau kelompok meningkat karena dianggap memiliki relevansi penting bagi aktor yang terlibat. Relevansi dianggap penting ketika aktor tersebut memiliki *power* yang kuat dalam sebuah forum sehingga dia melakukan tindakan subjektif yang memberikan keuntungan pribadi atau kelompok<sup>17</sup>. Bagi sebagian besar masyarakat, *vested interest* memiliki konotasi yang negatif melihat realitas yang telah terjadi di berbagai forum organisasi di seluruh dunia. Faktanya tindakan ini dianggap sah dan rasional walaupun banyak pihak yang dirugikan karena akan menyebabkan tersingkirkannya kepentingan sosial dimana mereka tidak seharusnya lakukan terhadap sebuah kebijakan. Rata-rata kepentingan ini selalu berkaitan dengan materi mengingat saat ini hampir seluruh urusan dan masalah akan selesai jika ditutup dengan materi. Bahkan tega menggugurkan kesejahteraan masyarakat demi keuntungan yang akan dicapai. Sebagai contoh akhir-akhir ini banyak kasus pemerintah yang

---

<sup>16</sup> James, C., & Argyle, E. (2014). A way of thinking about vested interests. *Policy Quarterly*, 10(4).

<sup>17</sup> Johnson, I.M., Siegel, J.T., & Crano, W.D. (2014). Expanding the reach of vested interest in predicting attitude-consistent behavior. *Social Influence*, 9, 20 - 36.

semena-mena menetapkan kebijakan terkait bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak covid-19 bahkan dana untuk masyarakat istilah nya “masuk kantong” sehingga kucuran dana yang sampai ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu. Faktanya, yang terjadi pada pertengahan 2021 bahwa mantan menteri sosial bersama rekannya melakukan aksi korupsi dana bantuan sosial mencapai Rp 5,9 T dengan total kontrak 272 selama dua periode. Tentunya aksi tersebut berdampak pada perubahan kebijakan dana yang disalurkan ke masyarakat mulanya memiliki nominal cukup justru menjadi kecil bahkan tidak dapat disebut “cukup” untuk kategori kebutuhan pokok.<sup>18</sup> Masyarakat khususnya kelas menengah kebawah sangat dirugikan dengan perbuatan tersebut disaat keadaan yang sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok justru kelompok kepentingan ini melakukan tindakan yang mengugurkan hak kepentingan umum dalam bernegara.

Tidak selamanya konotasi vested interest negatif karena dari kepentingan pribadi ini justru memberikan dampak tidak langsung bagi masyarakat misal dalam sebuah pemilu calon pasangan yang akan maju kebanyakan mereka akan melakukan aksi kampanye dengan mendatangi komunitas yang memiliki rasa solidaritas tinggi yaitu pondok pesantren. Dengan menjalin relasi dengan pondok pesantren biasanya tokoh politik ini akan memberikan balas budi berupa kebutuhan pokok bahkan bantuan finansial untuk menunjang pembangunan sarana prasarana di pondok pesantren tersebut. Selain itu contoh lain terdapat pada sistem hukum umum Inggris, kebijakan publik kadangkala mengalami peregeseran oleh *vested interest* karena kebijakan tersebut akan menyebabkan dampak buruk bagi kepentingan umum. Oleh karena itu pemerintah Inggris menetapkan klausul pembatasan dalam perdagangan karena akan menyebabkan monopoli.

---

<sup>18</sup>Wahyuni Sahara, Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara, [https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasuskorupsi\\_bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasuskorupsi_bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all), akses tanggal 4 Februari 2022

Sehingga walaupun telah disetujui oleh beberapa pihak, pengadilan dapat menetapkan hal tersebut menganggapnya bukan berdasarkan kepentingan umum.

Dalam hal ini pada penelitian yang berjudul relasi yang terjadi antara tokoh politik dengan pondok pesantren bisa jadi memiliki arti kepentingan yang positif atau negatif mengingat tidak selamanya tindakan atas dasar kepentingan pribadi ditujukan karena adanya dampak yang dapat merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori *vested interest* dimana akan menganalisis relasi yang telah terbentuk diantara dua aspek yang berbeda sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan akan memberikan gambaran sebenarnya yang telah terjadi kalangan pesantren maupun politik akhir-akhir ini.

#### 1.6.2 Teori *Pilihan Rasional*

Teori ini membahas tentang tindakan individu dalam melakukan tindakan yang memanfaatkan sumber daya agar tercapai sebuah tujuan tertentu. Dalam teori pilihan rasional *James S. Coleman* menyebutkan bahwa terdapat dua aspek penting yang saling berkesinambungan satu sama lain yaitu subjek sebagai pelaku tindakan dan sumber daya yang menjadi alat untuk mencapai sebuah tujuan tersebut.<sup>19</sup> Teori ini berangkat dari individu yang menyeleksi pilihan yang akan menjadi tujuannya sebagai aktor yang berperan dalam masyarakat. Maka dari itu sebelumnya telah disinggung bahwa pilihan rasional pasti melibatkan norma serta *human capital*. Karena individu akan dipengaruhi oleh sistem norma yang mulanya muncul dari tindakan sejumlah orang serta tidak mengikat perilaku orang lain.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Asyhar, A. (2017). *Politik kekuasaan kampus dalam tinjauan perilaku sosial: studi tentang pemilihan umum raya dewan eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 2016 perspektif pilihan rasional James S. Coleman* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

<sup>20</sup> Wulantami, A. (2018). Pilihan Rasional Keputusan Perempuan Sarjana Menjadi Ibu Rumah Tangga. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 7(1).

Awalnya teori ini dikembangkan dari ilmu sosiologi yang kemudian mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya karena berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk tercapainya sebuah tujuan misalnya dalam suatu negara pasti terdapat perumusan kebijakan yang didasari oleh kepentingan individu. Dari kepentingan individu tersebut pembuat kebijakan akan menganalisis rumusan kebijakan sehingga dapat menjadi tujuan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Contoh lain terdapat pada relasi kepentingan yang terjadi pada tokoh politik dan *elite* lokal pondok pesantren di mana integrasi yang timbul di antara dua aspek tersebut menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga dalam kasus tersebut teori pilihan rasional kemudian berkembang menjadi teori yang bersifat global.<sup>21</sup>

Teori pilihan rasional sering kali dipandang sebagai teori yang unik dan berbeda dari pendekatan teori lain karena teori ini memiliki komitmen pada sebuah metode individualis serta perspektifnya mengenai pilihan sebagai sebuah proses dari optimalisasi. Lebih lanjut, metode individualis dalam teori ini dipakai oleh ahli sosiolog untuk menjelaskan tindakan yang memiliki tujuan dengan sumber daya sesuai yang diinginkan oleh aktor.<sup>22</sup> Sehingga pada dasarnya konsep daripada teori ini merupakan tindakan individu yang diumpamakan sebagai perimbangan dana dengan keuntungan sehingga tindakan yang dilakukan lebih mengarah pada kepentingan pribadi atau terselubung. Sehingga dalam teori pilihan rasional semua keputusan oleh individu yang bertindak sama-sama diartikan sebagai bagian dari proses “rasional”. Untuk itu proses dari pilihan rasional tindakan

---

<sup>21</sup> Arjawa, G. S. (2014). Pilihan Rasional di Balik Pembebasan Corby. *Jurnal Global dan Strategis*, 8(1), 49-62.

<sup>22</sup> RIYANA, D. (2017). *RASIONALITAS PENGGUNAAN BARANG ELEKTRONIK HANDPHONE PARALLER IMPORT (BLACK MARKET) PADA PEGAWAI BEA DAN CUKAI (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

yang didasari oleh kalkulasi untung dan rugi, sedangkan untung rugi sendiri didasari oleh informasi.<sup>23</sup>

Setiap aktor dalam melakukan tindakan yang memiliki sumber dan akses sumber daya berbeda dengan dijadikan sebagai modal atau alat untuk mencapai kepentingan yang telah direncanakan. Karena dalam pandangan Coleman, “syarat minimal terjadinya aktivitas sosial ditimbulkan oleh dua aktor yang mana memiliki modal sumber daya yang berbeda sehingga akan tercipta integrasi baik itu bersifat menguntungkan atau merugikan kedua belah pihak. Namun tidak jarang pula sebagian tindakan tersebut tidak berjalan karena aktor merasa dampak yang ditimbulkan sangat merugikan pihak lain.<sup>24</sup> Dalam teorinya Coleman berfokus pada diagnosis masalah dan solusi sebagai berikut:

**a. Perilaku Kolektif**

Munculnya perilaku kolektif karena aktor bersangkutan ingin memaksimalkan kepentingannya untuk mencapai tujuan tertentu sehingga akan menciptakan keseimbangan kontrol beberapa aktor dan juga menciptakan keseimbangan masyarakat. Namun karena sifat perilaku kolektif yang memaksimalkan kepentingan ini menjadikan seseorang akan memindahkan kontrol atas tindakannya terhadap orang lain yang justru dapat menghambat keseimbangan dalam sistem sosial.<sup>25</sup>

**b. Norma**

*Coleman* berpendapat bahwa norma dalam suatu kelompok sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh aktor untuk memegang kendali (*power*) agar dapat mengontrol orang lain di

---

<sup>23</sup> Rosidin, R. Analisis Teori Pilihan Rasional Terhadap Transformasi Madrasah. *Madrasah*, 7(2), 147175.

<sup>24</sup> Mujiati, N. (2018). *Kepedulian masyarakat petani dalam meningkatkan pendidikan anak di Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dalam tinjauan Pilihan Rasional James S. Coleman* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

<sup>25</sup> Ningtyas, A. S., & Santosa, B. (2019). MINAT PEMUDA PADA PERTANIAN HORTIKULTURA DI DESA KELOR KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL. *Journal of Development and Social Change*, 2(1), 49-60.

mana memiliki tujuan untuk menciptakan serta meningkatkan konsensus di antara ketidakseimbangan sistem sosial.<sup>26</sup>

### c. Aktor Korporat

*Coleman* beralih ke tingkat makro untuk meningkatkan analisis terhadap konflik sosial dalam membahas aktor kolektif. Menurutnya pelaku tindakan sebaiknya bertindak atas kepentingan yang bersifat kolektif. Karena aktor kolektif berperan penting dalam menentukan apakah tindakannya dapat memberikan dampak positif atau negatif kepada individu. Peran tersebut dapat terlihat ketika kedaulatan terletak pada individu dan seberapa baik kepentingan tersebut yang disadari dalam sebuah sistem sosial.<sup>27</sup>

Begitu pun dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori pilihan rasional dimana aktor tidak hanya berkorelasi sebagai lembaga pendidikan dan politik tetapi merambah pada hubungan timbal balik yang bersifat kepentingan terselubung antar dua subjek tersebut. Sebelumnya teori pilihan rasional telah menyinggung bahwa hasil dari implementasi teori tersebut sering kali mencerminkan kepentingan pribadi. Seperti yang dilakukan pada dua pihak ini dimana menurut mereka terbangunnya relasi antara politik dan agama banyak memberikan keuntungan bagi keduanya karena sama sama bertujuan untuk mendapatkan dukungan baik secara material maupun politik. Pondok Pesantren Sarang Rembang salah satunya, pesantren ini telah memberikan banyak peran tidak hanya agama dan pendidikan saja tetapi sebagai peran kepelatihan, pengembangan masyarakat, serta sebagai simbol budaya.

---

<sup>26</sup> Ardan, R. D. F. (2017). *KOMERSIALISASI BENCANA LUMPUR LAPINDO (Studi Kasus Mengenai Pilihan Rasional Para Pelaku Komersil Terhadap Bencana Lumpur Lapindo)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

<sup>27</sup> Ningtyas, A. S., & Santosa, B. (2019). MINAT PEMUDA PADA PERTANIAN HORTIKULTURA DI DESA KELOR KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL. *Journal of Development and Social Change*, 2(1), 49-60.



Dalam melaksanakan peran tersebut, lembaga yang dipimpin oleh kyai umumnya memiliki kelebihan yaitu kharismaniknya terhadap santri dan masyarakat sehingga kelebihan ini yang kemudian menarik perhatian dari tokoh politik untuk mendapatkan suara mayoritas dalam kegiatan politiknya.<sup>28</sup>

Relasi antara Pondok Pesantren Al-Anwar dengan PPP dibuktikan dengan lolosnya satu calon DPRD bernama H. Kamil MZ ke kursi DPRD Rembang karena dia mendapatkan suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara 6.841 suara. Untuk Pondok Pesantren sendiri mendapatkan keuntungan berupa bantuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan lingkungan pesantren tersebut. Lambat laun proses relasi yang telah terjadi ini telah mengakar pada diri santri dan para pengasuh serta menjadi budaya setiap kali pelaksanaan pemilu. Tindakan yang nampaknya sudah menjadi budaya dalam lingkungan tersebut telah mengindikasikan bahwa relasi ini juga didasari oleh persamaan ideologi antar pihak yakni antara Pondok Pesantren dan tokoh politik memiliki ideologi Nahdhatul Ulama (NU) sehingga semakin memeperkuat intregrasi diantara keduanya.<sup>29</sup> Ideologi NU dikenal sebagai organisasi yang secara konseptual memusatkan perilaku pada kehidupan keagamaan, sosial, serta budaya dari kyai yang menjadi panutan masyarakat. Solidaritas yang terbentuk dari perilaku kyai kepada masyarakat membuat lembaga ini berperan kuat dalam perkembangan masyarakat islam khususnya dibidang pendidikan. Karena pendidikan islam memberikan dampak sosio-cultural berwawasan filosofi, memberikan pandangan perilaku untuk membentuk realitas sosial baru.<sup>30</sup>

Jika dikaitkan antara perilaku kolektif dalam teori pilihan rasional dengan penelitian ini, bahwa perilaku kolektif ditunjukkan melalui seorang

---

<sup>28</sup> Fahmi, M. A., IP, S., Kuswandro, W. E., Sos, S., Ubaid, A. H., & IP, M. (2014). Relasi Partai Politik dengan basis massa, Studi kasus partai Persatuan Pembangunan dengan pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. *Universitas Brawijaya: Jurnal*.

<sup>29</sup> Ibid.13

<sup>30</sup> Najib, A. A. (2020). Konsep Dasar Pendidikan Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy'ari. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), <https://doi.org/>

tokoh politik yang memberikan bantuan kepada masyarakat di lingkungan pesantren dengan maksud ingin memperluas dukungan karena tau lingkungan pesantren memiliki kultur masyarakat yang kompak sehingga apapun yang pemimpin mereka lakukan akan diikuti karena menurut mereka merupakan sesuatu yang benar. Perilaku kolektif muncul saat kondisi struktural masyarakat yang memiliki ruang terbuka yang berpotensi untuk seseorang melakukan perilaku kolektif.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, relasi yang terjadi antara tokoh politik dan pondok pesantren akan menggunakan analisis teori pilihan rasional yang mana interaksi yang mendorong tindakan kolektif oleh aktor korporat dengan melalui norma yang tumbuh di masyarakat akan menciptakan tujuan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Selain itu dua aspek terpenting yang terlibat dalam relasi ini yaitu aktor dan sumber daya sehingga. Sebagai aktor pasti melakukan tindakan ini karena di dorong adanya kebutuhan atau keinginan baik bersifat kepentingan pribadi atau kelompok dengan menetapkan biaya serta ganjaran yang telah disetujui oleh kedua pihak. Sehingga Abraham Harold Maslow mengemukakan seorang manusia dimotivasi oleh berbagai kebutuhan serta keinginan yang muncul dalam urutan hierarki yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri.<sup>32</sup> Seperti kasus yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kedatangan Khofifah dalam kegiatan santunan anak yatim tersebut memiliki tujuan tidak hanya ikut serta menyukseskan program dari Pondok Pesantren Segoro Agung saja tetapi terdapat tujuan politisi yang artinya baik Khofifah ataupun pihak Pondok Pesantren saling memberikan *feedback* berupa kegiatan yang berunsur pemerintahan secara

---

<sup>31</sup> Haris, A., Rahman, A. B. A., & Ahmad, W. I. W. (2019). Mengenal gerakan sosial dalam perspektif ilmu sosial. *Hasanuddin Journal of Sociology*, 15-24.

<sup>32</sup> Sastrawati, N. (2019). Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman. *Al-Risalah*, 19(2), 187-197.

mudah sedangkan untuk pihak Pesantren akan mendapatkan bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan serta pembangunan Pondok Pesantren. Melalui analisis teori pilihan rasional maka dapat diharapkan bahwa pilihan rasional akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini sehingga akan mempermudah peneliti untuk memberikan gambaran tentang relasi yang terjadi antara tokoh politik dengan Pondok Pesantren Segoro Agung.

### **1.6.3 Keterlibatan Pesantren dalam Dunia Politik**

Dunia pesantren sungguh sangat menarik untuk dikaji dan diteliti. Bagaimana tidak, dunia pesantren memiliki khazanah sosial yang sangat beragam untuk diteliti dan dikaji dari berbagai sudut pandang keilmuan. Hal ini membuktikan posisi pesantren yang saat ini sudah menjamur diberbagai penjuru pulau di Indonesia menjadi bukti bahwa pesantren tidak hanya dinilai sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia akan tetapi juga memiliki pengaruh yang kuat bagi arus politik di Indonesia.

Hingga kini perdebatan keterlibatan antara santri, kyai, dan pesantren dalam politik selalu berpusat pada lingkup 2 pendapat yang kontradiktif. Pendapat *pertama* berpendapat bahwa relasi pesantren dan politik dianggap sebagai sesuatu yang wajar asalkan tidak menyimpang dari ajaran agama islam. Pendapat ini semakin kuat dengan realitas para kyai yang banyak berpartisipasi langsung atau tidak langsung dengan politik. Sedangkan pendapat *kedua* mereka yang berpendapat mengkritik dan menentang dengan keras karena relasi tersebut bersifat pengingkaran terhadap fungsi asli pesantren sebagai lembaga pendidikan islam serta posisi politik yang seharusnya menjaga independensi dan posisi murni politik. Keterlibatan pesantren dalam urusan politik lebih banyak mendatangkan *madhorot* dari pada manfaat. Jadi sebaik apapun landasan teologisnya maka terlibat dalam urusan politik akan dianggap sebagai lembaga yang terseret dalam dunia yang “kotor”.

Selaras dengan paradigma antara agama dengan demokrasi yang mempunyai 2 kubu masyarakat sebagai bentuk penolakan serta pembelaan. Pada satu sisi mengungkapkan bahwa hubungan antara islam dan demokrasi merupakan hal yang tidak bisa digabungkan dengan kata lain keduanya tidak ada kecocokan satu sama lain. Karena islam merupakan agama yang bersifat unik dan jauh dari kata modern dan tertutup dengan dunia luar. Sedangkan disisi lain hubungan antara agama dengan demokrasi keduanya saling memberikan timbal balik dan dukungan yang bersifat positif. Karena umat islam diyakini memiliki unsur loyalitas yang kuat untuk memajukan unsur demokratis dan toleransi.<sup>33</sup>

Kontroversi seperti itu memang tidak akan pernah menemukan tuntas karena masing-masing pihak akan mempertahankan argumentasi etis maupun praktis sebagai bentuk pembelaan mereka. Oleh karena itu sebagai fokus permasalahan alasan yang melandasi banyaknya tokoh politik menjalin relasi dengan dunia pesantren maka dalam pembahasan ini akan menganalisis motif yang melatarbelakangi keterlibatan pesantren dalam dunia politik atau relasi antara tokoh politik dengan pondok pesantren (Pondok Pesantren Segoro Agung Mojokerto).

Keterikatan pihak pesantren dengan dunia politik tidak disebabkan hanya karena kepentingan membela islam, tetapi lebih mengarah pada tipologi umat islam yang memandang adanya hubungan antara politik dengan islam. Mengetahui tipologi serta potret kehidupan pada pesantren cukup menarik, alasannya karena corak dan karakteristik pesantren yang unik. Tipologi ideal pola kehidupan umat islam yang selama ini dapat dilihat dalam sistem hubungan dunia pesantren yang berpusat pada kyai telah berubah. Saat ini pesantren lebih mengarah pada tipologi pesantren yang

---

<sup>33</sup> Muhammad Adnan, Wahid Abdulrahman, dan Budi Setyono, "Islam, Democracy and Political Leadership in Surakarta Municipal," 23 April 2020, <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2294405>.

mengikuti peradaban modern yang rasionalistik.<sup>34</sup> Seluruh pondok pesantren pada jaman sekarang dituntut untuk bersikap profesional ketika berhadapan langsung dengan masyarakat yang artinya secara langsung atau tidak langsung pesantren pasti akan terlibat ke dalam dunia politik. Sehingga pada pelaksanaannya pesantren yang memiliki keterlibatan politik dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipologi politik pesantren.

**a. Tipologi Ideologis**

Tipologi ini memandang bahwa sebagai umat islam harus memposisikan sikap politik sama dengan agama islam. Dalam artian umat islam memiliki semangat pembelaan politik seperti membela agama islam. Sehingga ketaatan pada agama islam sama dengan ketaatan dalam berpartisipasi politik.

**b. Tipologi Kharismatis**

Dalam hal ini mereka mengasumsikan bahwa setiap umat islam akan memilih tokoh politik berdasarkan sikap dan perilaku seseorang yang mereka kagumi di lingkungannya. Semua perkataan dan nasehat dari orang tersebut dianggap sebagai rujukan oleh masyarakat. Akan tetapi hal ini akan memperburuk kondisi perpolitik di lingkungan tersebut jika masyarakat tidak dapat mengontrol semangat demokrasi. Akibatnya umat islam akan dipandang sebagai umat yang tidak memiliki rasionalitas dalam menentukan sikap politik.

**c. Tipologi Rasional**

Mereka beranggapan bahwa setiap umat beragama atau golongan tertentu memiliki hak dan kedudukan yang sama ketika bersikap politik. Berpikir secara rasional merupakan poin utama ketika seseorang akan menentukan sikap politik. Setiap manusia

---

<sup>34</sup> Muhammad Fahmi, "Mengenal Tipologi dan Kehidupan Pesantren," *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 6 (2 Oktober 2015).

memiliki hak untuk melakukan sesuatu atau tindakan ketika semua orang tidak mempersalahkan tindakannya. Artinya, jika seseorang memilih bertindak secara rasional maka sebagai acuan untuk melakukan tindakan tersebut adalah orang disekitarnya, jika mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut maka diperbolehkan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melalui paradigma *interpretivisme* dan pendekatan *fenomenologis*. Paradigma *interpretivisme* berangkat dari pandangan terhadap realitas sosial yang saling berkesinambungan, dinamis, kompleks, memiliki makna, serta interaksi antar gejala yang bersifat simbiosis atau hubungan timbal balik. Oleh karena itu dengan adanya pandangan seperti itu perilaku seseorang atau sekelompok manusia terjadi bukan tidak disengaja melainkan melalui faktor tertentu yang menjadi penggerak hubungan timbal balik antara gejala sosial. Selain itu paradigma ini memandang sebuah realitas itu bersifat jamak serta holistik.<sup>35</sup>

Sedangkan pendekatan fenomenologis merupakan pengalaman seseorang dalam memaknai gejala sosial tertentu. Fenomenologi berusaha menganalisis suatu fenomena dengan sudut pandang tertentu untuk mendapatkan kejelasan suatu fenomena yang dialami seseorang secara langsung. Sehingga dalam pelaksanaan penelitian ini, sebagai individu yang pernah mengamati relasi antara pondok pesantren dan tokoh politik maka peneliti ingin menjangkau lebih lanjut dan mendalam pola relasi yang terjadi karena peneliti merasa pendekatan fenomenologi menjadi pendekatan yang tepat karena berusaha mengungkap fenomena gejala sosial dengan sudut pandang peneliti. Peneliti akan berusaha masuk pada dunia

---

<sup>35</sup>Rahardjo, M. (2018). Paradigma Interpretif. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 1-5.

konseptual subjek yang diteliti sehingga terbentuklah pengertian berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.<sup>36</sup>

### **1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto yang beralamat di jalan Syekh Jumadil Kubro, Kedaton, Sentonorejo, Kec. Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Adapun waktu penelitian dirancang akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan oleh dosen dan narasumber yang terpilih menjadi informan. Waktu dalam penelitian ini dapat berubah sehingga dalam pelaksanaannya penambahan waktu bisa dilakukan tergantung kelengkapan data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### **1.7.3 Sumber dan Jenis Data Penelitian**

#### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan sumber utama penelitian yang berasal dari proses penelitian secara langsung.<sup>37</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah pendiri pondok pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto yaitu K.H. Bimo Agus Sunarno atau yang biasa dengan panggilan Kyai Agus. Kyai Agus merupakan orang yang paling berpengaruh dalam pendirian pondok pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto. Subjek penelitian selanjutnya adalah para stakeholder dan para pejabat yang pernah bekerjasama dengan pondok pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto. Pihak yang terlibat merupakan pihak yang terlibat langsung dan saling mendukung proses kegiatan yang berlangsung di pondok pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto. Sedangkan objek penelitian ini adalah informasi atau data yang diperoleh dari subyek penelitian. Objek penelitian ini adalah proses kegiatan politik dan sosial

---

<sup>36</sup>Kuswarno, E. (2006). Tradisi fenomenologi pada penelitian komunikasi kualitatif: sebuah pengalaman akademis. *MediaTor (Jurnal Komunikasi)*, 7(1), 47-58.

<sup>37</sup>Munawaroh, M. (2016). *Relasi agama dan negara (kekuasaan) perspektif Ibnu Khaldun* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

yang dilaksanakan di pondok pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang berasal dari perantara pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan historis yang sudah tersusun dalam sebuah arsip yang terpublikasikan.<sup>38</sup> Peneliti akan memperoleh data sekunder dengan studi literatur dan berpikir kritis terhadap permasalahan pada penelitian tersebut. Sehingga data sekunder yang dapat diambil mengenai pola relasi serta analisis kepentingan yang terjadi antara pondok pesantren dengan tokoh politik.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data peneliti melakukan 3 tahapan, yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Penggunaan model wawancara yang dilakukan dengan wawancara semi terstruktur sehingga peneliti dapat menghimpun informasi yang terarah dan terbuka pada informan. Wawancara diperlukan berkaitan dengan metode penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif. Wawancara merupakan salah satu sumber data yang sering digunakan dalam kualitatif. Selain itu, wawancara dalam penelitian kualitatif digunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, karena wawancara untuk studi kasus bukan hanya untuk mengetahui ada dan tidak adanya sesuatu akan tetapi dengan wawancara diharapkan peneliti lebih memahami suatu keadaan dan peristiwa tertentu.<sup>39</sup> Sehingga untuk menunjang keberhasilan penelitian ini akan melakukan wawancara dengan K.H. Bimo Agus Sunarno selaku pendiri pondok pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto yang memaparkan bahwa pentingnya keterlibatan pesantren dalam sektor apapun khususnya pada bidang politik. Kemudian melakukan

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm 31

<sup>39</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.329.



wawancara dengan Bu Endang Retno yang memaparkan bahwa pesantren harus berkekuatan pancasila. Selain itu Bu Silvia Maycahyani Hadi yang memaparkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidika harus mendapat dukungan dari pemerintah.

Peneliti juga mewawancarai tokoh politik Bapak H. Hidayat, S.Ag., M.Si. yang pernah berkunjung ke pondok pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto. Peneliti juga akan melakukan observasi di pondok pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto. Observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara langsung oleh peneliti dan akan disesuaikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Sehingga observasi yang dilakukan untuk memperkaya data yang diperoleh dalam penelitian yang dilaksanakan.

Adapun yang akan peneliti observasi berkaitan dengan relasi tokoh politik dengan pondok pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto. Pengumpulan data juga akan dilakukan oleh peneliti melalui dokumentasi untuk memperkuat data yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dilakukan berkaitan dengan proses relasi tokoh politik dengan pondok pesantren Segoro Agung Kabupaten Mojokerto.

#### **1.7.5 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini memanfaatkan analisis data teknis *Matthew B. Miles* dan *A. Michael Huberman*, khususnya reduksi data, tampilan data, dan verifikasi atau gambar temuan. Organisasi data adalah langkah pertama dalam reduksi data, yang memungkinkan kesimpulan dibuat sebagai tanggapan atas pertanyaan penelitian.<sup>40</sup> Pada titik di mana data disajikan untuk digunakan sebagai prosa naratif.<sup>41</sup> Penyajian data peneliti lakukan tindakan mengangkat data yang telah direduksi atau dipilih. Data yang

---

<sup>40</sup>Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press),.hlm.16.

<sup>41</sup>*Ibid.*,hlm.17

berkaitan dengan fokus atau pertanyaan penelitian disajikan dalam paparan penelitian kemudian dianalisis berdasarkan fokus atau pertanyaan penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi atau menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengartikan data yang telah disajikan. Data-data yang telah direduksi dan ditampilkan selanjutnya ditarik kesimpulan dalam upaya menjawab fokus atau pertanyaan penelitian.